



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hayyie, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tatanegara dan kepemimpinan dalam takaran Islam, Terjemahan dari Kitab Al-Ahkaamus sulthaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyah, Imam Al-Mawardi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah; Kajian Politik dan Hukum, Ghalia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007)

A.Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*,(Jakarta : ICCE, Kencana, 2008)

Bunyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta : Kencana,2000)

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2005), Ed, ke-2

Dr.Beni Ahmad Saebani,M.Si, *Fiqih Siyasa* , (Bandung : CV Pustaka Setia ,2015), cetakan, ke-2

Fathiy Syamsuddin Ramadhan An Nawiy, *Pamduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning*, (Jakarta : WADI PRESS, 2013)

HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005)

Hertina, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri, 2011)

J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)



Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Marbun SF. Dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1987)

Mawardi, al, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. (Beirut : Al-Qahirat, 1950)

Munawir Sjadzali, 1990, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1990)

Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, (Bandung : PT. Reika Aditama, 2013)

Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Grasindo, 2007)

Nurul Hidayati, *Metodologi Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : Uin Jakarta Press)

Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003)

Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Romi Libyanto, *Trias Politika dalam Struktur ketatanegaraan Indonesia*, (Makassar : PUKAP-Indonesia, 2008)

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003)

Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasa*, (Jakarta : Raja Grafindoa Persada, 1995)

Syekh Taqiyyudin al-Nabhaniy, *Nizaam al-Islam*, (Beirut : Dar an Nahdlah, 1991)

Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta : 1957), cetakan keempat



Sumber Lain

<http://www.tempo.co/read/news/2013/02/09/063460207.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/pemerintah_daerah_di_indonesia.html

[http://blog.unila.ac.id/pdih/files/2016/05/hukum-tata-pemerintahan-dan pelayanan-publik - 3.Pdf](http://blog.unila.ac.id/pdih/files/2016/05/hukum-tata-pemerintahan-dan_pelayanan-publik_3.Pdf)

[http://id.Wikipedia.org/wiki/Kepala Daerah dan wakilkepala daerah.html](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kepala_Derah_dan_wakilkepala_daerah.html)

<http://id.wikipedia.org/wiki/pelaksanaTugas.html>

<http://www.tempo.co/read/news/SKKEMEDNAGRI/2016/09/22/098760907.html>

Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Surat Keputusan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) No.K.26-20/V.24-25/99 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UUAP) Tentang Administrasi Pemerintah